



**Pemerintahan Kabupaten Kutai
Kartanegara**

*Pencana Kerja
Tahun. 2025*

Kecamatan Tabang

Alamat. Jl. Ibau Ajan, Desa Muara Pedohon, Kecamatan Tabang,
Kabupaten Kutai Kartanegara



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA TH. 2025

KECAMATAN TABANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Pemerintahan Kecamatan Tabang dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja ini bermuatan program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun itu, Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman dan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang kemudian dirumuskan ke dalam Rencana Kerja atau Renja.

Demikian pengantar singkat ini dibuat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Tabang, Maret 2024

Camat,



RAKHMADANI HIDAYAT S.IP.M.Si.
NIP. 19880429 200701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
1.5 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
1.6 TABEL T-C. 33	11
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KECAMATAN TABANG TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026.....	11
1.7 TABEL.T-C.32	21
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	21
BAB III.....	38
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	38
1.8 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
BAB IV	41
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	41
1.9 Program dan Kegiatan	41
1.10 TABEL T-C.31.....	43
RUMUSAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KECAMATAN TABANG TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	43
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	43
BAB V	50
PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2), pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/ kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja perangkat daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki renja perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan mengacu kepada rencana strategis perangkat daerah. Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja perangkat daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam visi dan misi yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2024 serta keberhasilan (*succes story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum kecamatan dalam menyusun rancangan Renja Kecamatan Tabang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :
Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Tabang selama tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.
2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Tabang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025 .

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan.

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum rencana kerja (Renja) Kecamatan Tabang Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA”**. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam renstra perangkat daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Tabang telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Menyusun dokumen perencanaan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2025, mulai dari proses Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
2. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan

Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2023 S/D TAHUN 2023
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TABANG

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan, dikarenakan program dan kegiatan di tahun 2022 masih dalam proses berjalan.

1.5 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Tabang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Tabang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada dinas instansi yang berada di wilayah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tabang selama kurun waktu tahun 2022-2023 dinilai cukup. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Tabang, yaitu :

1. Predikat akuntabilitas kinerja;
2. Predikat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tabang;
3. cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Tabang.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, kecamatan juga merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kecamatan.
3. Pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan.
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
6. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
7. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum diwilayah kecamatan.
8. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan diwilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan penatausahaan/ urusan kesekretariatan kecamatan.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Tabang dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya :

1. Permasalahan Internal :
 - Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi.

- Belum optimalnya jaringan internet yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikelola oleh Diskominfo sehingga data-data dan laporan yang diproses melalui jaringan internet tidak bisa maksimal dilaksanakan di Kecamatan Tabang dan ada beberapa titik yang tersebar di wilayah desa yang masih Blank Spot (Tidak ada Jaringan).
 - Belum dapat dilaksanakannya beberapa poin pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat karena belum adanya petunjuk teknis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.
2. Permasalahan Eksternal:
- Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
 - Jarak antara desa-desa dan ibu kota kecamatan yang relatif jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
 - Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desa yang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf.
2. Melaporkan kepada pihak Diskominfo untuk bisa memperbaiki jaringan internet di Kecamatan Tabang.
3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan.
4. Melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat.
5. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
6. Melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat.

Dari beberapa aspek permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Tabang sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa potensi yang dimiliki antara lain :

1. Potensi dibidang pertambangan yaitu terdapatnya perusahaan-perusahaan batubara yang berada di Desa Gunung Sari, Desa Umaq Dian, Desa Buluqsen, Desa Ritan Baru, dan Desa Tukung Ritan.
2. Potensi perkebunan kelapa sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT. Rea Kaltim Plantations yang arealnya sampai berlokasi di Desa Gunung Sari dan Desa Long Lalang.
3. Potensi Pertanian yaitu terdapatnya usaha pertanian padi sawah di Desa Sidomulyo, Desa Umaq Dian, Desa Kampung Baru, Desa Umaq Tukung dan dan padi ladang ada di desa-desa yang termasuk diwilayah Kecamatan Tabang,
4. Potensi Kayu yang sampai Tahun 2024 ini masih memiliki ijin penebangan yakni berada di Desa Muara Kebaq, Desa Muara Tuboq, Muara Belinau, Desa Muara Salung, dan Desa Muara Tiq yang termasuk diwilayah Kecamatan Tabang.

2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan dilihat pada tabel T-C. 31, sebagaimana berikut.

1.6 TABEL T-C. 33

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KECAMATAN TABANG TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KECAMATAN TABANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.350.000.000,00				702.500.000,00	
1	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			3.350.000.000,00				702.500.000,00	
1	1	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Tabang	1 Laporan	300.000.000,00	PAD	1 Laporan	345.000.000,00
1	1	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tabang	4 Laporan	3.050.000.000,00	PAD	4 Laporan	357.500.000,00

				yang Dilimpahkan								
2				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				841.000.000,00				932.650.000,00
2	1			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				811.000.000,00				932.650.000,00
2	1	1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tabang	12 Laporan	811.000.000,00	PAD		12 Laporan	932.650.000,00
2	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				30.000.000,00				
2	2	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec. Tabang	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	PAD		7 Lembaga Kemasyarakatan	34.500.000,00
3				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				230.000.000,00				264.500.000,00

3	1			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				230.000.000,00				264.500.000,00
3	1	1		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tabang	1 Dokumen	50.000.000,00	PAD		1 Dokumen	57.500.000,00
3	1	2		Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang difasilitasi	Kec. Tabang	1 Kegiatan	60.000.000,00	PAD		1 Kegiatan	69.000.000,00
3	1	3		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Tabang	1 Kegiatan	60.000.000,00	PAD		1 Kegiatan	69.000.000,00
3	1	4		Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tabang	1 Kegiatan	60.000.000,00	PAD		1 Kegiatan	69.000.000,00
4				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				95.000.000,00				107.000.000,00

				PEMERINTAHAN DESA								
4	1			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				95.000.000,00				107.000.000,00
4	1	1		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tabang	1 Dokumen	50.000.000,00	PAD		1 Dokumen	57.500.000,00
4	1	2		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tabang	19 Laporan	45.000.000,00	PAD		19 Laporan	49.500.000,00
5				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.537.948.197,00				12.118.640.726,00
5	1			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00				57.500.000,00
5	1	1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tabang	1 Laporan	50.000.000,00	PAD		1 Laporan	57.500.000,00

5	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah				915.697.000,00				1.053.051.550,00
5	2	1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tabang	1 Paket	285.697.000,00	PAD		1 Paket	328.551.550,00
5	2	2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tabang	1 Paket	75.000.000,00	PAD		1 Paket	86.250.000,00
5	2	3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tabang	200 Laporan	500.000.000,00	PAD		200 Laporan	575.000.000,00
5	2	4		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Tabang	10 Dokumen	50.000.000,00	PAD		10 Dokumen	57.500.000,00
5	2	5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tabang	1 Paket	5.000.000,00	PAD		1 Paket	5.750.000,00
5	3			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				710.000.000,00				816.500.000,00
5	3	1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Tabang	1 Unit	710.000.000,00	PAD		1 Unit	816.500.000,00
5	4			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				291.352.242,00				335.055.378,00

5	4	1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tabang	3 Laporan	60.000.000,00	PAD		3 Laporan	69.000.000,00
5	4	2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tabang	1 Laporan	231.352.242,00	PAD		1 Laporan	266.055.378,00
5	5			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.388.420.000,00				1.596.683.000,00
5	5	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tabang	4 Unit	112.420.000,00	PAD		4 Unit	129.283.000,00
5	5	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tabang	11 Unit	200.000.000,00	PAD		11 Unit	230.000.000,00

5	5	3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tabang	2 Unit	500.000.000,00	PAD		2 Unit	575.000.000,00
5	5	4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tabang	5 Unit	576.000.000,00	PAD		5 Unit	662.400.000,00
5	7			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				400.000.000,00				460.000.000,00
5	7	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tabang	1 Dokumen	50.000.000,00	PAD		1 Dokumen	57.500.000,00
5	7	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tabang	1 Dokumen	50.000.000,00	PAD		1 Dokumen	57.500.000,00
5	7	3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec. Tabang	1 Laporan	50.000.000,00	PAD		1 Laporan	57.500.000,00

					ja SKPD							
5	7	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tabang	1 Laporan	150.000.000,00	PAD		1 Laporan	172.500.000,00
5	7	5		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tabang	7 Dokumen	50.000.000,00	PAD		7 Dokumen	57.500.000,00
5	7	6		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tabang	1 Dokumen	50.000.000,00	PAD		1 Dokumen	57.500.000,00
5	8			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.683.182.955,00				7.685.660.398,00
5	8	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tabang	50 Orang/bulan	6.533.182.955,00	PAD		50 Orang/bulan	7.513.160.398,00
5	8	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kec. Tabang	2 Laporan	150.000.000,00	PAD		2 Laporan	172.500.000,00

					Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD							
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			99.296.000,00				114.190.400,00	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tabang	50 Orang/bulan	99.296.000,00	PAD		50 Orang/bulan	114.190.400,00
							15.053.948.197,00					

2.8 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Tabang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026. Rencana kerja Kecamatan Tabang Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara/ Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/ Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Tabang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berikut ini usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang):

1.7 TABEL.T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah:

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Fasilitasi Pertemuan lembaga/komunitas seni (Seminar/Workshop)	lanjutan Pembangunan Balai Desa	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Kampung Baru RT 02, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tabang	Semenisasi jalan Usaha Tani 700 Mtr	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Kampung Baru RT 02, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
3	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Rehab Seleng Jembatan Gantung Penghubung Desa Umaq Bekuay menuju Desa Bila Talang sudah sangat mengkhawatirkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jalan Desa Umaq Bekuay menuju Desa Bila Talang, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
4	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Belum adanya Jembatan Permanen Sungai Bengen Desa Umaq Bekuay	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Bekuay, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum

5	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Belum tersemenisasinya Jalan TPA Desa Umaq Bekuay Panjang 500 M lebar 4 M	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Bekuay, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
6	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Belum adanya Kendaraan Vlar Pemadam 3 Unit	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Bekuay, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kurang nya Sumber daya Manusia untuk Bimtek dan Pelatihan Kelompok Peternakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Tukung, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pertanian dan Peternakan
8	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kurang nya Sumber daya Manusia untuk Bimtek dan Pelatihan Kelompok Pertanian	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Tukung, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pertanian dan Peternakan
9	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kurangnya pembinaan dan Modal Usaha Budidaya Ikan Mas,Nilla, Patin Kelompok Tani Desa Umaq Tukung	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Tukung, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kelautan dan Perikanan

10	Event Olahraga Tradisional dan Rekreasi	sudah menjadi even Tahunan kegiatan Pelaksanaan Perayaan MENCAK UDAT	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Ritan Baru, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Akses Jalan Belumpur dan Rusak (Semenisasi Jalan Baru Pemukiman Jalur 5)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Ritan Baru, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
12	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	belum adanya Bangunan TPA /Tempat Pembuangan Akhir Sampah (pembangunan TPA Desa Ritan Baru)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Ritan Baru, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Belum terbinanya dan tersedia Saprodi bagi Nelayan (Pengembangan Budidaya Lobster Air Tawar /Ikan Nila/Lele sistem BIO-FLOG	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Ritan Baru, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Jalan yang ada dalam kondisi rusak dan berlubang-lubang (Semenisasi Jalan Utama Desa Ritan Baru menuju Desa Tukung Ritan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Ritan Baru, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum

15	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tabang	Perlunya Peningkatan dan Semenisasi Jalan Menuju Jembatan Kembar (Three Brigges Twins) Sungai Belayan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT.006 Desa Tukung Ritan Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
16	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Akses Jalan yang Cukup rusak untuk jalan penghubung (Semenisasi jalan Menuju Sungai Lunuk)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
17	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	belum adanya semenisasi jalan, kondisi jalan setapak tanah berlumpur	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tabang	Mendesaknya Pembangunan Jembatan Konstruksi Beton Sei Payang Desa Tukung Ritan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT.006 Desa Tukung Ritan Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
19	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Akses Jembatan yang sangat mengkhawatirkan (Pembangunan Jembatan beton Menuju Sungai Lunuk)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
20	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kurangnya Sumber daya Manusia yang terampil (Bimtek/Pelatihan Kelompok Peternakan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pertanian dan Peternakan

21	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kurangnya Sumber daya Manusia yang terampil (Bimtek/Pelatihan Kelompok Pertanian)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pertanian dan Peternakan
22	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum terbangun atap lapangan futsal	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tabang	Perlunya Peningkatan dan Semenisasi Jalan Utama Merang Ala Desa Tukung Ritan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT.001-RT.006 Desa Tukung Ritan Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
24	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kurangnya Sumber daya Manusia yang terampil (Bimtek/Pelatihan Kelompok Perikanan Air tawar)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kelautan dan Perikanan
25	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Akses Jalan yang masih rusak serta Berlumpur kalo hujan (Lanjutan peningkatan Jalan Usaha Tani Jenau)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pertanian dan Peternakan

26	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Tabang	Perlunya Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Tukung Ritan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT.005 Desa Tukung Ritan, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
27	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Pembangunan Atap Lapangan Futsal Desa, (Belum Adanya Atap)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
28	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Mendesaknya Lanjutan Pembangunan Lamin Adat Desa Tukung Ritan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT.006 Desa Tukung Ritan, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pekerjaan Umum
29	Pengadaan Mebel PAUD (Pengadaan Meja kursi Guru, Meja kursi Siswa, Lemari rak buku, lemari file,)	Pengadaan Sarana Prasarana Paud (Belum Adanya Sarana Prasarana Paud)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kurangnya pembinaan dan Modal usaha untuk Kelompok Tani (Pengadaan Bibit Ikan Lele,Nila,Patin)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kelautan dan Perikanan
31	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kurangnya pembinaan dan Modal usaha untuk Kelompok Tani (Pengadaan Bibit Sawit)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perkebunan

32	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Perlunya Pembangunan Kantor Desa Tukung Ritan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT.005 Desa Tukung Ritan, Kab. Kutai Kartanegara			-
33	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kurangnya pembinaan dan Modal usaha untuk Kelompok Tani (Pengadaan Pupuk untuk kelompok Tani)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pertanian dan Peternakan
34	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	Bibit Sawit (Belum Adanya Bibit Sawit Untuk Kelompok Tani)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perkebunan
35	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Perlunya Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Tukung Ritan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT.005 Desa Tukung Ritan, Kab. Kutai Kartanegara			-
36	Drainase jalan Lingkungan (Bet-on/Pasangan Batu)	Belum adanya parit jalan (Pembangunan Drainase /Parit Jalan Perumahan Relokasi Desa Muara Pedohon)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

37	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Perumahan (Lebar Jalan 4 Meter)	Kondisi alternatif jalan yang rusak dan belum ada perbaikan. ketika hujan warga tidak bisa menggunakan akses tersebut menggunakan kendaraan sehingga warga harus berjalan kaki menuju gereja yang berada di RT 05. selain itu juga akses penghubung RT01 dan RT 05 sudah banyak warga menjadi korban kecelakaan dikarekan jalan rusak dan berlubang.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT 01 dan RT 02 Desa Ritan Baru Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan
38	Penggantian Jembatan Kecamatan Panjang > 6 Meter Struktur Beton	Pembangunan Jembatan Beton Desa Umaq Bekuay ke Desa Bila Talang (Belum Adanya Jembatan Beton Permanen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Bekuay, Kab. Kutai Kartanegara			-
39	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Belum Adanya Bangunan Kantor Desa (Pembangunan Kantor Desa Muara Pedohon)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara pedohon, Kab. Kutai Kartanegara			-
40	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	belum ada/tersedianya gedung BPU yang layak untuk kegiatan warga desa.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT 05 Desa Ritan Baru Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara			-

41	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Belum adanya Bangunan Balai KB (Pembangunan Balai KB Desa Muara Pedohon)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara pedohon, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pembangunan Lamin Adat (Belum Adanya Lamin Adat Desa)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Bila Talang, Kab. Kutai Kartanegara			-
43	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	kurangnya fasilitas olahraga dalam memenuhi aktivitas olahraga warga desa seperti tribun lapangan, lapangan badminton, lapangan takraw, lapangan volly dan dan perawatan lapangan sepak bola.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT 04 Desa Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
44	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Belum adanya Bangunan Gedung Sekretariat PAUD /TK (Pembangunan Gedung Sekretariat PAUD/TK Desa Muara Pedohon)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	belum adanya Gedung Posyandu (Pembangunan Gedung Pos Yandu Desa Muara Pedohon)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
46	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Belum adanya Bangunan Gedung (Pembebasan lahan untuk Gedung Satu Atap Desa Long Lalang)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Laong Lalang, Kab. Kutai Kartanegara			-

47	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Pembuatan Parit Jalan Desa Sidomulyo ke Desa Muara Belinau (Belum Adanya Parit Jalan Antar Desa)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
48	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Peningkatan Semenisasi Jalan Desa Sidomulyo ke Desa Kampung Baru Jalur 3 (Kondisi Jalan Rusak Berat)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
49	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Bibit Buah Buahan (Belum Adanya Bibit Buah Bagi Kelompok Tani)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
50	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan, Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	karangan adalah salah satu objek wisata alam yang berada di wilayah Desa Ritan Baru. untuk menuju ke sana masih menggunakan transportasi sungai (ketinting/ces) sehingga hal ini perlu di bangun jalan untuk menuju wisata alam Karangan.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sungai Belayan, Hulu Desa Ritan Baru Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara			-
51	Event Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kurang adanya Pembinaan Pengrajin (Pembinaan, Pengembangan dan Pengadaan sarana dan Prasarana Pembuatan Kerajinan Anyaman dan Ro-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Tuboq, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kepemudaan dan Olahraga

		tan Desa Muara Tuboq)					
52	Event Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kurang adanya Pembinaan Pengrajin (Pembinaan, Pengembangan dan Pengadaan sarana dan Prasarana Pembuatan Kerajinan Anyaman dan Rotan Desa Muara Salung)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Salung, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
53	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pembangunan Kantor Desa Satu Atap (Belum Adanya Pembangunan Kantor desa Satu Atap Untuk Kemudahan Pelayanan Kepada masyarakat)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Bekuay, Kab. Kutai Kartanegara			-
54	Peningkatan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	Rehab Irigasi Bendungan Cek Dam (Belum Adanya Perbaikan Irigasi bendungan Untuk Kelompok Tani)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Dian, Kab. Kutai Kartanegara			-
55	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Pengerasan Jalan Usaha Tani (Belum Adanya Pengerasan Jalan Usaha Tani)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Buluk Sen, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
56	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tabang	Jalan yang ada sudah Rusak (Semenisasi Jalan Poros Pusban Desa Muara Tiq)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Tiq , Kab. Kutai Kartanegara			Kecamatan Tabang

57	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	Belum adanya Fasilitasi Olah Raga (Pembangunan Fasilitasi Olah Raga Desa Muara Tiq	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Tiq, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
58	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Belum adanya pembinaan dan Bibit (Pengadaan Bibit Sengon dan Bibit tanaman Coklat Desa Muara Belinau)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Belinau, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
59	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	Mesin Pemadam Kebakaran (Belum Adanya Sarana Pemadam Kebakaran Desa)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Kebaq, Kab. Kutai Kartanegara			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
60	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Rehab Jembatan Jalan Poros Utama Desa (Sebagai Sarana Warga Masyarakat Kondisi Jembatan Rusak)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Kebaq, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
61	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Peningkatan Semenisasi Jalan Sei Siring (Belum Adanya Semenisasi Jalan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Kebaq, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
62	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Belum adanya Semenisasi Jalan Gang Pengembangan Desa	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Bila Talang RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

63	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Belum adanya Bibit Kakao untuk Kelompok Tani Jong Permai	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Bila Talang, Kab. Kutai Kartanegara			-
64	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Belum adanya Bangunan Balai/Lamin Adat Desa untuk Warga berkumpul Adat dan Budaya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Bila Talang, Kab. Kutai Kartanegara			-
65	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	Bangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Kondisi Rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Bila Talang RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
66	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RUSAK BERAT	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	JALAN PEMBANGUNAN DESA GUNUNG SARI, Kab. Kutai Kartanegara			-
67	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	SERING TERJADINYA BANJIR DAN KANTOR DESA DEKAT DENGAN TANAH LONSOR AKIBAT BANJIR	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	JALAN GERBANG DAYAKU DESA GUNUNG SARI, Kab. Kutai Kartanegara			-
68	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	belum adanya mebelair di SDN 03 Bila Talang (Meja Kursi Guru, Meja Kursi Siswa dan Sisiwi, Lemari Arsip)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Bila Talang RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

69	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Rehab Berat Ruang Kelas Belajar SDN 03 Bila Talang (Kondisi Rusak Berat)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Bila Talang RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara			-
70	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Belum Terbangun Atap Lapangan Futsal	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
71	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	Desa Muara Ritan yang terletak di wilayah yang rawan terhadap bahaya kebakaran. Kehadiran motor pemadam kebakaran di desa ini sangat penting untuk meningkatkan respons dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran. Proposal ini disusun dengan tujuan untuk mengajukan pembelian motor pemadam kebakaran untuk Desa Muara Ritan.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Ritan , Kab. Kutai Kartanegara			-
72	Penggantian Jembatan Kecamatan Panjang > 6 Meter Struktur Beton	Belum adanya Jembatan Permanen Sungai Bengen Desa Umaq Bekuay	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Bekuay, Kab. Kutai Kartanegara			-

73	Penggantian Jembatan Kecamatan Panjang > 6 Meter Struktur Beton	Pembangunan Jembatan Beton Desa Umaq Bekuay ke Desa Bila Talang (Belum Adanya Jembatan Beton Permanen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jalan Transportasi Desa Umaq Bekuay ke Desa Bila Talang , Kab. Kutai Kartanegara			-
74	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	perlu di bangun kembali jembatan yang kokoh karena kondisi jembatan saat ini kurang baik karena dimakan usia untuk dilalui kendaraan. kondisi saat ini jembatan kayu ulin rapuh, semen coran berlubang dan banyak kayu-kayu sebagai penyangga.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RT 001 Desa Ritan, Kecamatan Tabang., Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
75	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka, ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan Paku Marka)	Pelajar Desa Muara Ritan banyak yang ingin menempuh pendidikan SMK sedangkan SMK hanya ada di Desa Perdana yang jaraknya 30Km dari Desa Muara Ritan. sehingga memerlukan angkutan guna menunjang sarana transportasi pelajar di Kecamatan Tabang khususnya Desa Muara Ritan, Ritan Baru, Tukung Ritan dan Long Lalang.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Ritan RT 002, Kab. Kutai Kartanegara			-
76	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan yang ada rusak, berlubang dan berlumpur	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

77	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Belum adanya Pembangunan Kantor Desa satu atap untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Umaq Dian, Kab. Kutai Kartanegara			-
78	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum Adanya semenisasi jalan menuju tempat ibadah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Tabang Lama jln. kebaktian, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
79	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum Adanya semenisasi Jalan dan kondisi jalan yang rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
80	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Belum terbangunnya gedung Bangunan Kantor satu atap	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	desa umaq dian, Kab. Kutai Kartanegara			-
81	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Pembukaan Jalan dari Pondok Labu ke Desa Umaq Dian (Jalanan yang ada dalam kondisi rusak, berlubang -lubang dan berlumpur)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	desa umaq dian, Kab. Kutai Kartanegara			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
82	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pembangunan Lamin Adat Besar	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Tuboq, Kab. Kutai Kartanegara			-

83	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab berat RKB SDN Sungai Lunuk	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Muara Tiq, Kab. Kutai Kartanegara			-
84	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB SDN 004 Long Lalang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Long Lalang, Kab. Kutai Kartanegara			-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.8 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Ke-Empat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa bakti tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2010 tentang RPJPD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 memperhatikan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN tahun 2020-2024. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan nasional 2020-2024 adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia Lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA”.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani,
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya,
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif,
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, dan
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan Penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arahan kebijakan, serta program dan kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana strategis PD

kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam rencana kerja (RENJA-PD) dan rencana kerja anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan kedalam rencana kerja pemerintah daerah (RPKD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Kutai Kartanegara dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. RPKD merupakan bahan utama penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran, serta bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Rencana kerja pembangunan daerah, yang merupakan rencana tahunan pembangunan daerah, maka pada tahun 2023 yang merupakan tahap ke-tiga pelaksanaan RPJMD 2021-2026 ditetapkan tema pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

“PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI MASYARAKAT YANG LEBIH SEJAHTERA”

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah.
2. Pengembangan pola investasi daerah berbasis masyarakat.
3. Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat secara mandiri dan berkontribusi maksimal untuk perekonomian daerah.
4. Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung sentra produksi dan daerah potensi unggulan daerah.
5. Pemantapan interkoneksi antar wilayah khususnya antar desa antar kecamatan.
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat lebih sejahtera.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan. Maka untuk itu tujuan strategis Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum
		Pertumbuhan pendapatan asli desa
		Pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.9 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis (Renstra), Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut :

1.10 TABEL T-C.31

RUMUSAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KECAMATAN TABANG TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TABANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.951.207.032	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				11.137.948.197	-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Indikator	1 Indikator	400.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Indikator	1 Indikator	400.000.000	-
7010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2	50.000.000	
7010120102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	2	50.000.000	
7010120103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2	2	50.000.000	
7010120104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	1	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	1	50.000.000	-
7010120105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		3	3	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		3	3	50.000.000	
7010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2	2	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2	2	150.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Indikator	1 Indikator	5.011.869.280	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Indikator	1 Indikator	7.283.182.955	-
7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1	1	4.906.509.280	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1	1	7.133.182.955	
7010120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1		-
7010120207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2	2	105.360.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2	2	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Indikator	1 Indikator	17.900.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Indikator	1 Indikator	50.000.000	-
7010120305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	2	17.900.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	2	50.000.000	5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kekurangan Honor Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Indikator	1 Indikator	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Indikator	1 Indikator	99.296.000	-
7010120502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1	1	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1	1	99.296.000	
						- Pengadaan Pakaian Tradisional /Miskat			58 Stel	99.296.000	Belum adanya Pakaian Miskat dengan ciri khas batik tradisional asli setempat
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Indikator	1 Indikator	251.933.880	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Indikator	1 Indikator	915.697.000	-
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2	2	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2	2	5.000.000	
7010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2	2	25.120.880	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2	2	285.697.000	
						- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Personal komputer			9 Unit	123.340.000	Peralatan Kantor yang masih kurang
						- Pengadaan Perlengkapan Kantor			56 Unit	162.357.000	Perlengkapan Kantor yang masih kurang
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2	2	21.813.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2	2	75.000.000	
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2	2	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2	2		
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	2	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	2	500.000.000	
7010120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2	2	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2	2	50.000.000	
70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Indikator	1 Indikator	180.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Indikator	1 Indikator	710.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7010120702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2	2	180.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2	2	710.000.000	5.2.02.02.01.0002. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang - Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang.1.Kendaraan Dinas Operasional Trantib OPD Spesifikasi : ...,Double Cabin 4x4, 2500 cc dan Sewa 2.Kendaraan Oprasional Kecamatan
						5.2.02.02.01.0002. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang -Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang.1.Kendaraan Dinas Operasional Trantib OPD Spesifikasi : ...,Double Cabin 4x4, 2500 cc				520.000.000	Belum Adanya Kendaraan Dinas Operasional Untuk Trantib OPD Spesifikasi Double Cabin dan Sewa Kendaraan Operasional Kecamatan
						Sewa Kendaraan Oprasional Kecamatan Double Cabin 4x4, 2500 cc				190.000.000	Sewa Kendaraan Operasional Kecamatan
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Indikator	1 Indikator	263.152.242	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Indikator	1 Indikator	291.352.242	-
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		2	2	31.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		2	2	60.000.000	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2	2	231.352.242	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2	2	231.352.242	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Indikator	1 Indikator	826.351.630	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Indikator	1 Indikator	1.388.420.000	-
7010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2	2	112.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2	2	112.420.000	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2	2	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2	2	200.000.000	
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2	2	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2	5	500.000.000	
						-Pembangunan Gudang			1 Unit	110.000.000	untuk penyimpanan Arsip Kecamatan dan barang-barang Aset kecamatan
						- Rehab Rumah Dinas Gol 3			1 Unit	180.000.000	Dinaikan sering kena Banjir

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						- Rehab Ruang Pelayanan Umum/ Paten			1 Unit	150.000.000	Demi kenyamanan Pelayanan Masyarakat
						-Ruang laktasi (fasilitas ibu menyusui)			1 Unit	50.000.000	fasilitas ibu menyusui
						- Belanja Menambah Daya Listrik			1 Unit	10.000.000	Sangat di perlukan karena kekurangan daya
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2	2	113.931.630	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2	2	576.000.000	
						- Membuat Pagar Kantor Kecamatan Tabang			200 Meter	400.000.000	Sangat di perlukan karena kondisinya banyak hewan liar masuk(anjing)
						- Pembuatan Taman Kantor Camat			1 Unit	176.000.000	Yang ada tidak layak
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.220.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.350.000.000	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1 Indikator	1 Indikator	1.220.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1 Indikator	1 Indikator	3.350.000.000	-
7010220402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		2	2	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		2	1	300.000.000	
						- Fasilitasi Pelaksanaan PATEN (Pusat Satu Data)			1	300.000.000	
7010220403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3	3	1.200.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3	17	3.050.000.000	
						- Pembangunan Pendistribusian Jaringan Air Bersih			1	200.000.000	Belum Adanya Jaringan Air Bersih
						- Peningkatan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani)			1	200.000.000	Belum adanya akses Jalan Usaha Tani
						- Peningkatan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani)			1	200.000.000	Jalan Belum disemenisasi
						- Peningkatan Jalan Penghubung Desa Muara Pedohon Ke Desa Bila Talang			1	200.000.000	Jalan yang ada sudah rusak berlubang-lubang
						- Peningkatan Jalan Utama Penghubung Desa Umaq Dian dengan Desa Muara Pedohon			1	200.000.000	Jalan yang ada rusak berat berlubang-lubang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						- Pembangunan Pipa Pendistribusian Air Bersih Desa Muara Ritan			1	200.000.000	Belum adanya Pipa Pendistribusian Air Bersih
						- Semenisasi Jalan Poros Desa Muara Tiq			1	200.000.000	Jalan yang ada sudah rusak berat
						- Pembangunan Turap Desa Muara Salung			1	200.000.000	Sering terjadi longsor saat musim penghujan
						- Lanjutan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Milenia Jenau Makmur			1	200.000.000	Jalan yang ada rusak dan belumpur saat musim penghujan
						- Pembersihan Badan Jalan Kelompok Tani Desa Muara Belinau			1	150.000.000	Badan jalan kelompok tani yang ada tidak terpelihara
						- Peningkatan Semenisasi Jalan menuju Tempat Ibadah Desa Tabang Lama			1	200.000.000	Jalan yang ada belubang dan belumpur jika musim penghujan
						- Rehab Sedang Gedung serba Guna Desa Sidomulyo			1	200.000.000	Gedung Serbaguna yang ada rusak ringan
						- Peningkatan Saluran Irigasi Induk Usaha Tani			1	200.000.000	Saluran Irigasi usaha Tani yang ada sudah yang rusak
						- Pengadaan/ Penambahan Lampu Jalan Solar sel Desa Muara Pedohon			1	150.000.000	Jalan masih gelap belum ada lampu penerangannya
						- Semenisasi Jalan Desa Umaq Bekuay			1	200.000.000	Jalan yang ada belubang dan belumpur jika musim penghujan
						- Fasilitasi Dan Monitoring Pelaksanaan Pilkades dan Pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Tabang			1	100.000.000	Adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan BPD serentak di wilayah Kecamatan Tabang
						- Fasilitasi Dan Monitoring Pelaksanaan Lomba Desa dan Lomba RT di Kecamatan Tabang			1	50.000.000	Adanya Kegiatan Lomba Desa dan Lomba RT di Kecamatan Tabang sesuai surat dari sekda No P.82/SETDAKAB KU-KAR/400.10.2/02/2024
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				131.264.370	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				841.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Indikator	1 Indikator	131.264.370	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Indikator	1 Indikator	841.000.000	-
7010320101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		2	2	30.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		2	2	30.000.000	
7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2	2	101.264.370	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5	5	811.000.000	
						- Pelaksanaan Kegiatan Pramuka			1 Kegiatan	25.000.000	
						- Pelaksanaan Kegiatan Operasional PKK			1 Kegiatan	213.312.000	
						- Pelaksanaan Perayaan HUT RI			1 Kegiatan	186.688.000	
						- Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Linmas			1 Kegiatan	186.000.000	
						- Pelaksanaan HKG Tingkat Kabupaten			1 Kegiatan	200.000.000	Adanya pelaksanaan Kegiatan HKG Tingkat Kabupaten
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				300.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				230.000.000	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 Indikator	1 Indikator	300.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 Indikator	1 Indikator	230.000.000	-
7010520102	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		2	2	100.000.000	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		2	2	60.000.000	
7010520103	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		2	2	100.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		2	2	60.000.000	
7010520104	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional		2	2	50.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional		2	2	60.000.000	
7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		2	2	50.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		2	2	50.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				95.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN				95.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						DESA					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Indikator	1 Indikator	95.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Indikator	1 Indikator	95.000.000	-
7010620103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		2	2	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		2	2	50.000.000	
7010620117	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		2	2	45.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		2	2	45.000.000	
Total					8.697.471.402	-				15.643.948.197	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Tabang Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tabang.

Rencana Kerja Kecamatan Tabang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh kecamatan, penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Tabang.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tabang ini juga masih terdapat kurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tabang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabang, Maret 2024

Camat,



RAKHMADANI HIDAYAT S.IP.M.Si.
NIP. 19880429 200701 1 003